



Egaliter Masa Majapahit: Studi Kasus Penguasa Perempuan Majapahit Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī, 1329-1350

Gilang Harits Mu'aafi^{1*}, Yuliati², Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim³

¹ Universitas Negeri Malang; gilang.harits.1807326@students.um.ac.id

² Universitas Negeri Malang; yuliati.fis@um.ac.id

³ Universitas Negeri Malang; moch.nurfahrul.fis@um.ac.id

*Korespondensi

Dikirim: 27-09-2022; Diterima: 11-11-2022; Diterbitkan: 29-12-2022

Abstract: In ancient Java, women and men had an equal position in politics. This equality can be seen from the mention of men and women who have positions in high positions in royal politics. These positions include crown son/princess, regional ruler to the supreme ruler as the king/empress of the kingdom. This research uses historiographic methods that go through five stages, including topic selection, heuristics, source verification, source interpretation and historiography. This research found that during the Majapahit period, in addition to women having an equal position, women during the Majapahit era had also received legal protection as stated in *Kutaramanawa*. In addition to obtaining legal protection, women during the Majapahit period also had the same opportunity to obtain education or political training. Tribhuwanottuṅgadewī and Rājadewī had been given the opportunity to occupy the territories of vassal kingdoms as regional rulers in Kahuripan and Daha. After Tribhuwanottuṅgadewī ascended the throne to become empress in 1329, Gayatrī guided and played a behind the scenes role in the reign of Tribhuwanottuṅgadewī. During the Majapahit era, women had an important position in royal politics, ranging from rulers (central and regional) to playing a role behind the scenes of government.

Keyword: egalitarian; Majapahit; Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī

Abstrak: Pada masa Jawa Kuno perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam bidang politik. Kesetaraan tersebut terlihat dari disebutkannya laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan dalam jabatan tinggi politik kerajaan. Jabatan tersebut antara lain putra/putri mahkota, penguasa daerah hingga penguasa tertinggi kerajaan. Penelitian ini menggunakan metode historiografi yang melalui lima tahapan, diantaranya pemilihan topik, heuristik, verifikasi sumber, interpretasi sumber dan historiography. Penelitian ini menemukan bahwa pada masa Majapahit selain perempuan telah mempunyai kedudukan yang setara, perempuan pada masa Majapahit juga telah memperoleh perlindungan hukum seperti yang telah tertera dalam *Kutaramanawa*. Selain memperoleh perlindungan hukum, perempuan pada masa Majapahit juga telah mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan ataupun pelatihan politik. Tribhuwanottuṅgadewī dan Rājadewī telah diberikan kesempatan untuk menduduki wilayah kerajaan bawahan sebagai penguasa daerah di Kahuripan dan Daha. Setelah Tribhuwanottuṅgadewī naik tahta menjadi ratu tahun 1329, Gayatrī membimbing serta berperan dari balik layar pemerintahan selama pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī. Pada masa Majapahit perempuan telah mempunyai kedudukan penting dalam politik kerajaan, mulai dari penguasa (pusat dan daerah) hingga berperan dari balik layar pemerintahan.

Kata Kunci: egaliter; Majapahit; Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pada masa Jawa Kuno laki-laki dan perempuan telah mempunyai kedudukan yang setara terutama dalam bidang politik. Kesetaraan tersebut nampak dari disebutkannya laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai kedudukan dalam berbagai posisi jabatan politik di kerajaan. Jabatan tersebut antara lain yaitu putra atau putri mahkota, penguasa daerah, politikus dari balik layar pemerintahan hingga penguasa pemerintahan kota.

Pada masa Jawa Kuno terdapat seorang Ratu yang berkuasa yang bernama Ratu Sima (-). Prasasti Kañjuruhan (760 M) menyebutkan bahwa putri Raja Gajayāna (760 M) yang bernama Uttejana merupakan seorang putri mahkota yang hendak meneruskan tahta ayahnya. Selanjutnya dalam Prasasti Kayumwuān (824 M) yang menyebutkan tokoh perempuan yang bernama Prāmodawarddhanī yang merupakan putri dari Raja Samaratungga (746-784 M) dari Mataram Kuno. Selanjutnya terdapat jabatan *māhamantrī i hino* (penerima perintah raja) yang diduduki oleh putri Raja Airlangga (1021-1042 M) yang bernama Śrī Sanggrāmawijaya Dharmmaprāsadottunggadewī seperti yang tertulis dalam Prasasti Cane (1021 M). Prasasti Pucān (1037 M) menyebutkan nama seorang ratu yang berkuasa pada masa Mataram Kuno yaitu Śrī Īsanatunggawijayā (-). Namun, kapan Śrī Īsanatunggawijayā naik tahta hingga turun tahta belum diketahui dengan pasti waktunya. Setelah Śrī Īsanatunggawijayā belum ditemukan lagi perempuan yang diketahui sebagai ratu, hingga pada masa Majapahit ditemukan sosok ratu bernama Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī (1329-1350 M) seperti yang telah tertulis dalam Prasasti Genē II (1329 M). Pada masa Majapahit terdapat sebuah kerajaan beberapa kerajaan daerah yang diduduki oleh raja atau penguasa kerajaan daerah yang bergelar *Pāduka Bhaṭṭarāra* atau *Bhre*. Dalam Prasasti Prapañcasapura (tidak bertahun) disebutkan adik perempuan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī yang bernama Rājadewī Māharājasa menduduki kerajaan daerah yang berwilayah di Daha sebagai Bhre Daha. Kemudian anak Raja Hayam Wuruk yang bernama Kusumawarddhanī merupakan seorang putri mahkota (*rājakumarī*) yang berkedudukan di Kabalan (Bhre Kabalan). Pada akhir masa Majapahit diketahui pula seorang ratu yang berkuasa bernama Ratu Suhita (1429-1447 M) yang dalam *Pararaton* mempunyai gelar *Prabhu Strī* (Raja Perempuan) yang menggantikan ayahnya yang bernama Raja Wikramawarddhana (1389-1429 M). Kedudukan perempuan dalam menduduki wilayah kerajaan daerah pada masa akhir Majapahit di abad XV semakin meningkat seperti yang tertulis dalam Prasasti Warinīn Pitu (1447 M) nama pejabat penguasa daerah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki (Nastiti, 2016; Marwah, 2020).

Egalitarianisme pada masyarakat Jawa Kuno berakar dari adanya budaya masyarakat yang tidak membedakan penerima hak waris, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan politik di kerajaan termasuk seorang ratu. Meskipun tidak ada pembeda dalam penerima hak waris kerajaan, terdapat suatu

persyaratan sebelum memperoleh jabatan politik tersebut yaitu kedudukan putra atau putri mahkota yang hendak meneruskan warisan kerajaan haruslah merupakan anak pertama dari permaisuri atau istri utama raja (Nastiti, 2016; Saraswati, 2016; Darini, 2019).

Pada masa Majapahit perempuan tidak hanya memperoleh kedudukan dalam jabatan politik, namun juga telah memperoleh perlindungan hukum. Dalam kitab perundang-undangan Majapahit (*Kutaramanawa*). Dalam kitab perundang-undangan tersebut terdapat salah satu pasalnya yaitu pasal 207 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat orang yang memegang (mengganggu) seorang gadis hingga berteriak atau menangis dan disaksikan banyak orang. Maka orang-orang tersebut dapat menjadi saksi bukti sehingga pelaku dapat diberi pidana mati oleh raja yang sedang berkuasa (Munandar, 2008). Dilindunginya kaum perempuan oleh pemerintah Majapahit menandakan bahwa kedudukan perempuan pada masa Majapahit telah dihormati. Perempuan pada masa Majapahit juga telah diberikan kesempatan untuk belajar cara berpolitik seperti diangkat menjadi penguasa daerah ataupun diangkat sebagai putri mahkota kerajaan (*rājakumarī*).

Temporal yang diambil yaitu pada tahun 1329-1350 M, sebab pada kurun waktu tersebut telah diduga bahwa kedudukan perempuan telah egaliter dengan laki-laki dalam Majapahit. Tahun 1329 M diambil sebagai batas awal sebab pada tahun tersebut Gayatrī mengangkat putrinya Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī untuk menjadi ratu di Majapahit. Sementara tahun 1350 M diambil sebagai batas akhir sebab pada tahun tersebut Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī menyerahkan tahta Majapahit kepada Hayam Wuruk yang juga diiringi oleh wafatnya ibunda Gayatrī tokoh yang penting dari balik layar pemerintahan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī.

Kajian mengenai perempuan Asia Tenggara atau Nusantara pada masa klasik telah beberapa kali dilakukan antara lain oleh Andaya (2006), Nastiti (2016), dan Fitroh (2017). Andaya (2006) membahas mengenai status perempuan di Asia Tenggara tidak serendah status perempuan di Asia Selatan, Asia Timur, Melanesia dan Pasifik. Perempuan di Asia Tenggara telah diizinkan untuk turut mengelola maupun meneruskan kekayaan keluarga dan komunitas (Andaya, 2006). Sementara itu, Nastiti (2016) membahas kedudukan perempuan pada masa Jawa Kuno sejak abad VII-XV Masehi dalam berbagai bidang salah satunya politik. Begitu pun dengan Fitroh (2017) yang membahas mengenai peran dari Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī dalam upaya perkembangan kerajaan Majapahit. Beberapa kajian tersebut masih menyisakan ruang untuk dikaji lebih lanjut. Seperti diberikannya kesempatan bagi Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī dan Rājadewī Māharājasa selama masa muda mereka untuk memperoleh pelatihan atau pendidikan politik dengan memberikan mereka kedudukan di wilayah kerajaan daerah di Majapahit. kemudian diberikannya Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī bimbingan oleh Gayatrī Rājapatnī menandakan bahwa selain diberikannya kesempatan, perempuan juga telah diberikan pendidikan yang layak sebagai seorang penguasa.

Penelitian ini menggunakan perspektif gender dalam fokus lingkup kajian sejarah perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep teori feminisme liberal. Feminisme Liberal

abad ke-18 oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799) berpandangan bahwa perempuan wajib diberikan pendidikan yang layak, seperti pada laki-laki, karena semua manusia berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas dari dirinya (Tong, 1998). Adanya kesempatan bagi perempuan pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī untuk memperoleh pelatihan (pendidikan) yang setara dengan laki-laki menjadikan teori ini relevan untuk digunakan. Adapun pendidikan yang dimaksud pada masa Majapahit dalam konteks pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī adalah pelatihan dan pembimbingan langsung. Dengan begitu, Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī mampu menjadikan dirinya sebagai ratu yang mempunyai kekuatan politik luar biasa di Majapahit hingga memasuki masa pemerintahan anaknya, Raja Hayam Wuruk (1350-1389).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan memaparkan kedudukan perempuan yang egaliter dalam politik masa Majapahit pada era pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī (1329-1350). Penelitian ini juga menjelaskan mengenai kesempatan bagi Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī untuk belajar serta mengambil pengalaman politik sejak muda sehingga Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī mampu menjadi seorang penguasa perempuan yang mempunyai kekuatan politik yang cukup kuat di Majapahit. Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk menambah kajian mengenai sejarah perempuan terutama perempuan Nusantara pada masa klasik (Jawa Kuno). Selain itu, dalam masa pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī di Majapahit menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh kesempatan sejak muda untuk memperoleh pengalaman berpolitik dengan cara diberikan daerah kekuasaan di wilayah penting sebagai raja daerah yang menjadikan pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawisṇuwarddhanī menarik untuk dikaji.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode ini memiliki lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pemilihan topik mengenai egaliter masa Majapahit karena pada masa Majapahit perempuan telah memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki. Selanjutnya heuristik, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik kajian pustaka terhadap hasil pembacaan prasasti ataupun naskah kuno oleh para ahli. Langkah yang dilakukan untuk memperoleh sumber berupa hasil pembacaan prasasti adalah dengan melakukan observasi sumber prasasti di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan beberapa sumber lainnya berupa buku-buku diperoleh dari perpustakaan Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan laboratorium historiografi Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang.

Tahap selanjutnya adalah kritik atau verifikasi sumber yang dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah yang didapat. Dalam tahap ini terdapat dua proses yaitu kritik intern dan ekstern. Setelah menguji keaslian sumber, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahap interpretasi sumber data yang sudah diverifikasi kemudian dianalisis fakta sejarahnya.

Setelah dianalisis fakta sejarah tersebut kemudian disintesis dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori feminisme liberal. Mary Wollstonecraft (1759-1799) berpandangan bahwa perempuan wajib diberikan pendidikan yang layak, seperti pada laki-laki, karena semua manusia berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas dan moralnya (Tong, 1998). Tahap terakhir yaitu historiografi. Dalam tahap ini penulis melakukan penulisan rekonstruksi sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang valid serta hasil analisis dan sintesis dari tahap sebelumnya menjadi sebuah tulisan historiografi.

Hasil Penelitian

Kedudukan Perempuan di Majapahit: Pemerintahan Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī 1329-1350

Deśawarṇana dalam pupuh 49:2 mencatat bahwa penerus Raja Jayanagara di Majapahit adalah Bhre Kahuripan atau bernama asli Dyah Gitarja. Dalam Prasasti Genē II (1329 M) diketahui nama *abhiseka* (nama gelar raja) dari Dyah Gitarja setelah dinobatkan sebagai raja adalah *Śrī Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī* dan pada masa pemerintahannya Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī dibimbing langsung oleh ibunda Gayatī Rājapatnī. Sementara berdasarkan Prasasti Prapañcasarapura (t.t), adik perempuan Dyah Gitarja yang bernama Dyah Wiyat (Rājadewī Māharājasa) tetap berkuasa sebagai raja daerah di wilayah Daha dengan gelar Bhre Daha (Robson, 1995; Yamin, 1962b). Berdasarkan sumber sejarah tersebut, maka kedudukan perempuan dalam pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai penguasa (penguasa pusat dan daerah) dan politikus yang berperan dari balik layar pemerintahan.

1. Penguasa (Pemerintahan Pusat dan Daerah)

Sebelum naik tahta sebagai ratu di Majapahit, Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī terlebih dahulu menduduki daerah Kahuripan sebagai raja daerah. Dalam *Pararaton* kedua putri Raja Kṛtarājasa (Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat) diberikan kedudukan di kerajaan daerah yaitu Kahuripan dan Daha (Padmapuspita, 1966). Kedua wilayah tersebut baik Kahuripan maupun Daha merupakan dua wilayah yang dianggap penting dan mempunyai sejarah yang panjang. Alasannya adalah wilayah Kahuripan dan Daha telah ada sejak masa Raja Airlāṅga. Kahuripan merupakan nama ibukota kerajaan Raja Airlāṅga yang diidentifikasi sama dengan Jaṅgala, sedangkan Daha merupakan nama ibukota Kerajaan Pañjalu yang di kemudian hari dikenal dengan Kaḍiri (Djafar, 2012). Kedua wilayah tersebut tetap bertahan dan menjadi wilayah kerajaan daerah di Majapahit.

Dalam *Deśawarṇana* pupuh 49:1 disebutkan bahwa Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī merupakan penguasa di Jiwana/Kahuripan sebagai Bhre Kahuripan (Robson, 1995). Begitupun adik perempuannya Rājadewī Māharājasa diberikan kedudukan di Daha dengan menyandang gelar Bhre Daha bahkan setelah Ratu Tribhuwanottunggadewī naik tahta pada tahun 1329 seperti yang tertulis dalam Prasasti Prapañcasarapura (t.t) "(6) *mwang ājña çrī mahālakṣamyawatāra dahanagaryyadhiṣṭitānanwikramott (ungga).....āra rupanṛttā (7) di....mā(...). ikā sajjanahṛdayakumudaçaçangkasadrçā dyah wiyat...*" (Yamin, 1962b).

Adapun peran dari penguasa kerajaan daerah atau *Pāduka Bhaṭṭāra* di Majapahit adalah selain sebagai penguasa, mereka juga bertanggung jawab terhadap penghasilan kerajaan serta penyerahan upeti dari daerah yang dikuasai kepada bendahara kerajaan dan menjalani fungsi sebagai pertahanan wilayah (Nastiti, 2016). Tugas serta tanggung jawab tersebut telah diserahkan kepada Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī dan Rājadewī Māharājasa selama menjabat sebagai Bhre Kahuripan dan Bhre Daha.

Sejak muda baik Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī maupun Rājadewī Māharājasa telah mempunyai kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai penguasa serta mempelajari politik kerajaan dengan diangkat menjadi Bhre Kahuripan dan Bhre Daha. Pengalaman berpolitik Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī sejak menjabat sebagai Bhre Kahuripan kemudian mempunyai dampak kepada kekuatan politik Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī selama menjadi ratu di Majapahit.

2. Politikus dari Balik Layar Pemerintahan

Sosok politikus perempuan yang berperan penting dalam perpolitikan Majapahit pada masa pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī, politikus tersebut adalah ibunda Gayatrī Rājapatnī. Gayatrī memperoleh kedudukan di Majapahit sebab gelarnya *Rājapatnī* yang bermakna istri utama raja (Wahyudi, 2013). Dalam Prasasti Nararyya (1305 M) menyebutkan bahwa Gayatrī merupakan istri Raja Kṛtarājasa (1293-1309) yang paling utama dari ketiga istri lainnya (Yamin, 1962a). *Rājapatnī* juga dapat dikaitkan dengan jabatan *bupati estri* yang mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat terhormat untuk memimpin para wanita utama di Keraton Majapahit (Wahyudi, 2013). Oleh sebab itu, Gayatrī memperoleh keistimewaan serta kebesarannya di Majapahit yang didapatkan dari gelarnya tersebut.

Gayatrī Rājapatnī sebagai istri yang diutamakan oleh raja mempunyai keistimewaan dan kebesaran tersendiri bagi Majapahit. Gayatrī Rājapatnī mempunyai kepribadian yang kuat dan sangat menentukan, sebab Gayatrī Rājapatnī dapat memutuskan siapa yang berhak dan tidak untuk naik tahta Majapahit. *Deśawarnana* pupuh 49:2 menjelaskan bagaimana kedudukan Gayatrī yang sangat menentukan yaitu saat Gayatrī mengangkat putrinya Bhre Kahuripan (Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī) untuk menjadi ratu Majapahit (Robson, 1995).

Diduga setelah Raja Kṛtarājasa wafat pada tahun 1309 M, ketiga istrinya (Tribhuwanśwarī, Narendraduhitā, dan Prajñaparamitā) melakukan *bela pathi* (bunuh diri untuk mengikuti suami yang telah meninggal) sementara menyisakan Gayatrī Rājapatnī untuk mengasuh ketiga anak Raja Kṛtarājasa (Jayanagara, Tribhuwanottuṅgadewī, dan Rājadewī) (Nastiti, 2012). Gayatrī Rājapatnī mempunyai peran penting bagi Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī, sebab ibunda Gayatrī juga berperan sebagai “guru” bagi Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī. Prasasti Geneṅ II (1329 M) menjelaskan bahwa Gayatrī Rājapatnī memberikan bimbingan kepada ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī (*makalamanggalya*) ”(3)....çrī tribhuwanottuṅgadewī jayawisnuwarddhanī rājābhiṣeka samjñā pinitasajñā dya(h) tya pinratiṣṭa ti

tiktawilwanagara makamaṅgalyājna bhaṭara kretarājasapatnī" (Yamin, 1962b; Nastiti, 2016). Sebagai "guru" bagi Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī, Gayatrī

Rājapatnī mampu memberikan saran serta izin bagi Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī saat memberikan kebijakan. Dengan begitu Gayatrī Rājapatnī secara tidak langsung turut berperan dari balik layar pemerintahan.



Gambar 1. Prasasti Geneg II (1329 M)

(Sumber: Dokumentasi Teguh Fatchur Rozi)

Pencapaian Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī di Majapahit 1329-1350

1. Kebijakan Politik

Kebijakan pertama yang diambil Ratu Tribhuwanottuṅgadewī adalah penetapan *sīma swatantra* (daerah perdikan atau bebas pajak yang dianugerahkan raja). Penetapan *sīma* atau wilayah bebas pajak merupakan peristiwa penting, karena telah terjadi perubahan status kedudukan tanah di kalangan masyarakat (Maziyah, 2018). Pada tahun 1330 M berdasarkan izin dari Gayatrī Rājapatnī, Tribhuwanottuṅgadewī mengeluarkan Prasasti Paluṅ (1330 M) yang berisikan pemberian anugerah berupa penegasan kembali wilayah berstatus *sīma swatantra* di wilayah Padlĕgan "(13)..ri padlĕgan burehannya madga sīma swatantra"(Djafar & Trigangga, 2019). Anugerah tersebut diberikan kepada Saṅ Rājamantri atas jasanya kepada raja. Tribhuwanottuṅgadewī meneguhkan kembali wilayah Padlĕgan dengan menggunakan lencananya. Prasasti Paluṅ (1330 M) untuk pertama kalinya menyebutkan nama lencana yang digunakan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī "(14) sa(ḡ) hyangājā haji praśasti tinanda tri(bhuwana raja) (tunggadewi) la(ñcana).."(Djafar & Trigangga, 2019) diduga lencana Ratu Tribhuwanottuṅgadewī tersebut digunakan sebagai penanda bahwa dirinya merupakan raja yang berkuasa di Majapahit dan mengeluarkan prasasti. Lencana raja dapat dibagi menjadi dua jenis, lencana dengan menggunakan objek dan lencana dengan menggunakan nama *abhiseka* raja. Berdasarkan Prasasti Paluṅ tersebut, Ratu Tribhuwanottuṅgadewī menggunakan nama *abhiseka*-nya sebagai lencana raja (Witasari, 2011).



Gambar 2. Prasasti Paluian (1330 M)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Anugrah Ratu Tribhuwanottuṅgadewī lainnya diberikan kepada masyarakat di Prapañcasarapura dengan mengeluarkan Prasasti Prapañcasarapura (tanpa tahun). Tribhuwanottuṅgadewī menganugrahkan *sīma swatantra* di Prapañcasarapura sebab masyarakat Prapañcasarapura melakukan bakti yang luar biasa kepada sang raja (Ratu Tribhuwanottuṅgadewī) (Suhadi, 1993). Berdasarkan isi prasasti Prapañcasarapura (t.t), Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī menetapkan *sīma swatantra* berupa bangunan suci di Prapañcasarapura, "(18) ... sang hyang dharma ri prapañcasarapura kewala swatantradeg ri (19) nggit..." (Yamin, 1962b). Dengan adanya kebijakan politik penetapan *sīma swatantra* ini menandakan bahwa Ratu Tribhuwanottuṅgadewī berusaha untuk menciptakan relasi yang baik dengan rakyatnya pada awal masa pemerintahannya.



Gambar 3. Prasasti Prapañcasarapura (t.t)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

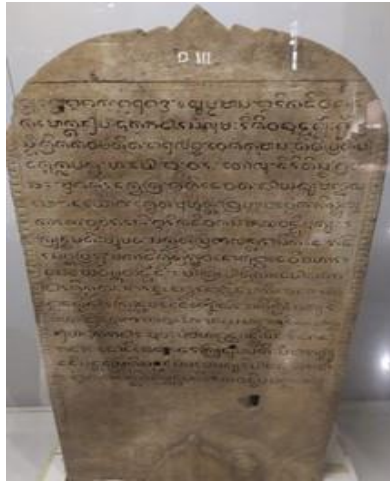
Jasa besar Ratu Tribhuwanottuṅgadewī yang kemudian berdampak kepada perkembangan Majapahit adalah kebijakannya dalam memperkuat kedudukan mahapatih Majapahit. Ratu Tribhuwanottuṅgadewī merasa bahwa posisi mahapatih sangat penting bagi

kerajaan. Mahapatih menduduki kedudukan sebagai menteri utama yang bersama dengan raja untuk menjalankan perintah raja (Wardana, 2017). Oleh karena itu, orang yang menjabat sebagai mahapatih haruslah orang kompeten.

Sumber sejarah mencatat setidaknya telah terjadi tiga kali pergantian pejabat mahapatih selama pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī. Dalam Prasasti Geneṅ II (1329 M) mencatat nama Pu Krewes sebagai mahapatih "(5)...*rakryan mapatih nāmawiçita pu krewes..*" (Yamin, 1962b). Pada tahun 1330 M rupanya Tribhuwanottuṅgadewī telah menemukan sosok yang lebih layak untuk menggantikan Pu Krewes. Sosok tersebut ialah Pu Nāla yang dituliskan dalam Prasasti Paluṅan (1330 M), "(5)...*rakr(yan) ri pakirakiran samudāya makādi rake mapatih pu nāla..*" (Djafar & Trigangga, 2019). Alasan mengapa Pu Nāla diangkat menjadi mahapatih masih belum jelas hingga sekarang, namun dikemudian hari nama Pu Nāla muncul kembali sebagai *Tumeṅguṅ Mañcanagara* dalam *Deśawarṇana* pupuh 72:2. Selanjutnya tercatat dalam Prasasti Parapañcasarapura (t.t) bahwa jabatan mahapatih Majapahit dilanjutkan oleh Gajah Mada, "(14) *rake mapatih ring majhapahit put gajahmada..*" (Yamin, 1962b).

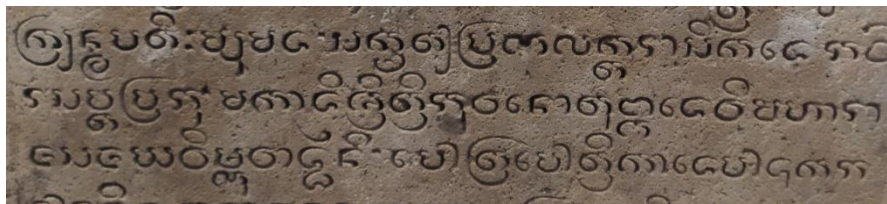
Diangkatnya Gajah Mada sebagai mahapatih merupakan bentuk kebijakan Tribhuwanottuṅgadewī dalam mengambil keputusan. Gajah Mada merupakan sosok yang sangat berjasa bagi Majapahit dan pemerintahannya. Salah satu jasa Gajah Mada dalam pemerintahan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī tercatat dalam *Deśawarṇana* pupuh 49:3 yang menjelaskan bahwa Gajah Mada membantu menyerang musuh di Sadheng dan Kēta pada tahun 1331 M (Robson, 1995). Gajah Mada juga menyebut *sumpah palapa* di hadapan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī. *Sumpah palapa* Gajah Mada ini yang kemudian menjadi kesempatan bagi Tribhuwanottuṅgadewī mengutus bawahannya termasuk Gajah Mada untuk memperluas pengaruh Majapahit hingga wilayah luar Jawa. Kebijakan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī dalam membuat kebijakan politik ini merupakan pencapaian Ratu Tribhuwanottuṅgadewī dalam bidang politik yang berdampak pada berkembangnya Kerajaan Majapahit.

Kekuatan politik Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī tidak cukup berhenti selama masa pemerintahannya saja. Berbekal segala pengalaman dan pendidikan dari bimbingan Gayatrī Rājapatnī, Ratu Tribhuwanottuṅgadewī mempunyai kekuatan politik hingga menjadi anggota utama dari lembaga bernama *Bhattara Sapta Prabhu* (dewan pertimbangan kerajaan) pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) (Nastiti, 2016). Prasasti Gajah Mada (1351 M) menyebutkan bahwa Tribhuwanottuṅgadewī sebagai anggota utama dari dewan *Bhattara Sapta Prabhu*, (8)..... *de bhaṭā (9) ra saptaprabhu. makādi śrī tribhuwanotuṅgadewi mahārā (10) jasa jayawiṣṇuwarddhanī* (Boechari, 2018) Dengan begitu, maka menjelaskan bahwa suara politik Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī masih kuat hingga masa Raja Hayam Wuruk.



Gambar 4. Prasasti Gajah Mada (1351 M).

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 5. Kutipan Prasasti Gajah Mada (1351 M) mengenai posisi Tribhuwanottuṅgadewī sebagai anggota utama dari dewan *Bhattara Sapta Prabhu*.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

2. Ekspedisi Wilayah

Makna gelar *abhiseka* Ratu Tribhuwanottuṅgadewī ialah *tribhuwana*=tiga dunia, *tuṅga*=tinggi, *dewī*=ratu. Makna Tribhuwanottuṅgadewī adalah "Ratu Penguasa Tiga Dunia" (Zoedmulder & Robson, 1995). Pada masyarakat Jawa Kuno dikenal konsep tiga dunia yaitu *bhurloka* (dunia bawah), *bhurvaloka* (dunia tengah), *svarloka* (dunia atas) (Istari, 2015). Secara konsep Tribhuwanottuṅgadewī merupakan penguasa dari ketiga dunia tersebut. Namun pada kenyataannya, pada masa pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī dilakukan ekspedisi hingga keluar pulau Jawa yaitu daratan Melayu (Sumatera) dan Bali sehingga Tribhuwanottuṅgadewī menguasai ketiga wilayah tersebut (Jawa, Melayu, dan Bali).

Raja Kṛtanagara (1268-1292) dari Siṅhasari merupakan raja pertama yang mencetuskan gagasan *cakrawala mandala* keluar Jawa *dwipantara*. Mulanya gagasan tersebut berhasil dilakukan oleh Kṛtanagara, namun seiring runtuhnya kekuasaan Kṛtanagara di Siṅhasari wilayah di luar Jawa sulit untuk dikendalikan (Tedjowasono, 2019; Rahmawati et al., 2013). Oleh sebab itu, Tribhuwanottuṅgadewī muncul untuk meneruskan gagasan *cakrawala mandala* tersebut dengan bantuan bawahan-bawahannya.

Kemenangannya atas perang Sadheng dan Kēta pada tahun 1331 M telah menyadarkan Tribhuwanottuṅgadewī bahwa kekuatan pasukan Majapahit telah pulih kembali. Ditambah lagi Gajah Mada telah diangkatnya menjadi mahapatih yang membuatnya yakin bahwa kekuatan Majapahit saat ini cukup kuat untuk memulai ekspedisi ekspansi wilayah ke luar Jawa (*cakrawala mandala*).

Ekspedisi pertama dilakukan pada tahun 1336 M dengan mengutus Adityawarmman yang dalam Prasasti Prapañcasapura menjabat sebagai *wṛdhamntri* untuk menjadi raja bawahan atas Majapahit di Sumatera. Kemudian Adityawarmman bersama dengan pasukan Majapahit membebaskan serta membawa pengaruh Majapahit kepada kerajaan Dharmasraya yang merupakan wilayah penting serta memegang komoditas lada (Rahmawati et al., 2013). Ekspedisi di daratan Melayu inipun kemudian berhasil, selain memperluas wilayah ke Sumatera, Majapahit di bawah kekuasaan Tribhuwanottuṅgadewī berhasil memegang komoditas dagang penting dari Sumatera yaitu lada yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Majapahit.

Ekspedisi kemudian dilanjutkan oleh Ratu Tribhuwanottuṅgadewī pada tahun 1343 untuk menaklukkan Kerajaan Bendahulu di Bali. Ratu Tribhuwanottuṅgadewī mengutus serta menyusun strategi dengan mahapatihnya Gajah Mada untuk melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Bendahulu di Bali. Kemenangan pun diraih oleh pihak Majapahit dan pada saat itu Bendahulu takluk dengan Majapahit. Kekalahan Bali tercatat dalam *Deśawarnana* pupuh 49:4 dengan menyebutkan bahwa pasukan Majapahit telah menghancurkan serta mengalahkan raja dari Bali yang jahat (Robson, 1995).

Keberhasilan Ratu Tribhuwanottuṅgadewī untuk menghidupkan kembali gagasan *cakrawala mandala* (perluasan wilayah ke luar Jawa) menjadikannya pelopor ekspansi wilayah bagi Majapahit. Keberhasilan Tribhuwanottuṅgadewī menjadi penguasa atas wilayah Jawa dan Bali pun tercatat dalam Prasasti Prapañcasapura (t.t), "(3)...*sakalayawamaṅḍalabalyādiparadwīpekacchātra, atiṣayadharmmajñā.....(r)yyāṣeṣ akṣa(4).....tribhuwano(5)ttungadewi jayawiṣṇuwarddhanīnāma rājabhiṣeka* (Yamin, 1962b). Keberhasilan Tribhuwanottuṅgadewī dalam memperluas pengaruh Majapahit juga membuka dampak kepada perekonomian Majapahit. Berita Cina yang berasal dari pedagang bernama Wangta Yuan dalam bukunya *Tao-i chih-lueh* (1349) mencatat bahwa populasi di *she-po* (Jawa) pada pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī sangat padat, tanahnya subur, dan terdapat banyak bahan ekspor utama (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Adanya pedagang Cina serta bahan ekspor utama menandakan bahwa pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī telah menjalin hubungan internasional yang baik dengan Cina serta menjadikan hubungan ekspor-impor menjadi sumber pemasukan bagi Majapahit. Kegiatan dagang ini pun diperkuat dengan adanya jabatan Rake Kanuruhan dalam pemerintahan Tribhuwanottuṅgadewī yang tercatat dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkannya. Rake Kanuruhan mempunyai tugas salah satunya berurusan dengan perdagangan yang dilakukan antar bangsa (Rahardjo, 2011).

Permasalahan Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī di Majapahit

1. Proses Suksesi Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī

Telah dikemukakan di atas bahwa Gayatrī Rājapatnī mempunyai peran penting dalam pemerintahan Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī. Terutama saat Gayatrī mendisposisikan Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī untuk menjadi ratu di Majapahit. Sebelumnya Raja Jayanagara wafat tanpa meninggalkan keturunan, sementara masyarakat Jawa Kuno pada umumnya menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal). Di sinilah peran politik dari balik layar Gayatrī dimulai dari suksesi putrinya, Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī.

Hak waris untuk menjadi raja tidak harus didasarkan kepada status keturunan langsung dari raja (ayah) melainkan juga dapat diperoleh haknya dari garis ibu (Rahardjo, 2011). Saat Jayanagara wafat tanpa anak, maka raja penggantinya dapat ditarik dari pihak ibu. Itulah mengapa keturunan Gayatrī yang menyandang gelar Rajapatnī atau istri utama raja berpeluang lebih besar untuk menjadi raja pengganti.

Selain itu, diduga suksesi Tribhuwanottunggadewī Jayawiṣṇuwarddhanī merupakan keputusan politik Gayatrī untuk menstabilkan kondisi Majapahit. Dalam diri Tribhuwanottunggadewī mengalir darah keturunan dari Ken Angrok dan Tunggul Ametung sekaligus. Gayatrī berkaca dari pemerintahan kakeknya, Raja Wisnuwarddhana (1248-1268 M) di Siñhasari. Raja Wisnuwarddhana merupakan keturunan Tunggul Ametung, sementara Wisnuwarddhana didampingi oleh saudaranya yang merupakan keturunan Ken Angrok yaitu Mahisa Cempaka. Pemerintahan Wisnuwarddhana dan Mahisa Cempaka berhasil membawa kestabilan konsisi masyarakat Siñhasari yang sebelumnya ramai oleh adanya perebutan kekuasaan antara keturunan Ken Angrok dan Tunggul Ametung (Damayanti, 2016).

Kondisi Majapahit sebelum pemerintahan Tribhuwanottunggadewī turut diwarnai berbagai macam konflik yang disebabkan oleh rasa iri dan ketidakpercayaan pejabat tinggi terhadap pemerintah (Fitroh, 2017). Dengan tujuan untuk menstabilkan kondisi Majapahit yang kacau, Gayatrī perlu untuk mendisposisikan Tribhuwanottunggadewī menjadi raja pengganti Jayanagara. Keberhasilan Tribhuwanottunggadewī untuk menstabilkan Majapahit tertulis dalam *Deśawarnana* dan *Pararaton* yang menyebutkan pasukan Majapahit telah berhasil menghancurkan musuh dalam perang Sadheng dan Kĕta tahun 1331 M.

2. Perang Sadheng dan Kĕta Tahun 1331

Peristiwa perang Sadheng dan Kĕta telah diutarakan dalam *Deśawarnana* dan *Parararton*. *Deśawarnana* pupuh 49:3 menyebutkan bahwa pasukan Majapahit dengan bantuan Gajah Mada telah berhasil mengalahkan musuh di Sadheng dan Kĕta pada tahun 1331 M. Dalam *Pararaton* perang Sadheng dan Kĕta ini berhasil dipadamkan oleh Tribhuwanottunggadewī sendiri dan kemenangan atas hal tersebut disematkan kepada sang ratu (Robson, 1995; Hardjowardojo, 1965)

Dapat diduga perang Sadheng merupakan suatu pemberontakan oleh rakyat Sadheng dan Kĕta untuk menentang ratu. Pemberontakan ini disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan rakyat

terhadap pemerintah yang merupakan dampak dari perang Jayanagara melawan Nambi di Lamajang (Berg, 1951). Lokasi Lamajang-Sadheng-Kĕta berada di sebelah timur Pulau Jawa. Sadheng berlokasi di sekitar Desa Puger dan Gunung Sadeng di Jember, sementara Kĕta berlokasi di Tanjung Ketah, sebelah utara wilayah Besuki, dan Lamajang merupakan wilayah Lumajang sekarang. Adanya kedekatan lokasi antara Lamajang-Sadheng-Kĕta maka sangat mungkin bahwa terjadinya perang di Sadheng pada tahun 1331 disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat sebelah timur Jawa terhadap pemerintah sejak peristiwa Nambi di Lamajang pemerintahan Jayanagara tahun 1316 (Sidomulyo, 2007).

Tribhuwanottuṅgadewī menyadari bahwa perang ini disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan masyarakatnya memutuskan untuk pergi turun langsung ke medan perang di Sadheng dengan membawa pasukan prajurit dari Majapahit. Tujuan Tribhuwanottuṅgadewī turun ke medan perang adalah antara lain untuk melegitimasi dirinya serta membangkitkan kembali kepercayaan rakyatnya dengan menundukkan wilayah Sadheng dan Kĕta. Pertarungan Sadheng dan Kĕta pun berhasil dimenangkan oleh pihak Majapahit atas nama Tribhuwanottuṅgadewī (Hardjowardojo, 1965). Dari Kemenangan Sadheng dan Kĕta atas nama Tribhuwanottuṅgadewī, maka perang ini dapat dimaknai sebagai upaya legitimasi Tribhuwanottuṅgadewī sekaligus sebagai langkah pertama Tribhuwanottuṅgadewī dalam menciptakan keamanan serta stabilitas politik Majapahit.

Kesimpulan

Perempuan pada masa Jawa Kuno telah mencapai kebebasannya dalam berpolitik. Pada masa Majapahit selain perempuan mempunyai kebebasan berpolitik juga mempunyai kesempatan dan pendidikan dalam bentuk pelatihan dan pembimbingan. Tribhuwanottuṅgadewī dan Rājadewī diberikan kesempatan untuk menguasai wilayah kerajaan daerah di Majapahit yaitu Kahuripan dan Daha sebagai bentuk pelatihan mereka dalam mempelajari politik kerajaan. Gayatrī Rājapatnī sang ibunda melakukan peran politik dari balik layar pemerintahan mulai dari turut mengangkat putrinya Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī mejadi ratu pada tahun 1329 hingga membimbing Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī pada masa pemerintahannya di Majapahit. Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī memperoleh pendidikan politik yang layak melalui ibunda Gayatrī Rājapatnī. Adapun perolehan pendidikan yang dimaksud pada masa Majapahit adalah pembimbingan dan pelatihan secara langsung sebagai seorang penguasa. Berbekal dari segala pengalaman saat menjadi Bhre Kahuripan dan hasil bimbingan Gayatrī Rājapatnī, Ratu Tribhuwanottuṅgadewī Jayawiṣṇuwarddhanī tumbuh menjadi sosok ratu yang mempunyai kekuatan politik yang luar biasa selama masa pemerintahannya tahun 1329-1350 hingga mempunyai pengaruh yang besar pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389) sebagai anggota utama dari dewan *Bhattara Sapta Prabhu*.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih juga dipanjatkan kepada pihak-pihak yang turut terlibat membantu peneliti dalam menyelesaikan

penelitian ini. Pihak-pihak tersebut terutama kepada dosen pembimbing dari Universitas Negeri Malang yaitu Ibu Dra.Yuliati, M.Hum dan Bapak Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim, S.Pd, M.Pd. ucapan terimakasih juga dipanjkatkan peneliti kepada kakak-kakak tingkat yaitu Mas Muhammad Fathur Risky, S.Hum dan Mas Eko Prasetyo, S.Hum yang telah membantu peneliti menemukan solusi serta memberikan bantuan literasi selama penulisan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Andaya, B. W. (2006). *Kuasa Rahim Reposisi Perempuan Asia Tenggara Periode Modern Awal 1400-1800*. Komunitas Bambu.
- Berg, C. C. (1951). *De Sadeng-Oorlog En De Mythe Van Groot-Majapahit*. Stichting Voor Culturele Samenwerking.
- Boechari. (2018). *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti (Tracing Ancient Indonesian History Through Inscriptions)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Damayanti, F. (2016). Pemerintahan Wisnuwardhana Ditinjau Dari Segi Politik Dan Keagamaan (1248-1268). *Avatara. e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(1), 1–6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/download/13329/12235>
- Darini, R. (2019). Kiprah Perempuan Majapahit Di Ruang Politik. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 20(1), 101–114. <https://doi.org/10.52829/pw.v20i1.176>
- Djafar, H. (2012). *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana & Masalahnya*. Komunitas Bambu.
- Djafar, H., & Trigangga. (2019). *Prasasti Batu: Pembacaan Ulang Dan Alih Aksara (Jilid II)*. Museum Nasional Indonesia.
- Fitroh, A. N. (2017). Peran Tribhuwana Tungadewi Dalam Mengembalikan Keutuhan Dan Perkembangan Kerajaan Majapahit tahun 1328-1350. *Avatara*, 5(2), 298–308. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/18928>
- Hardjowardojo, R. P. (1965). *Pararaton*. Bhatara.
- Istari, T. M. R. (2015). *Ragam Hias Candi-Candi di Jawa Motif dan Maknanya* (B. Sulistyanto (ed.)). Kepel Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Marwah, S. (2020). *Kuasa yang Meminggirkan Perempuan dalam Sejarah*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Maziyah, S. (2018). Implikasi Prasasti dan Kekuasaan pada Masa Jawa Kuna. *Anuva*, 2(2), 177. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.2.177-192>
- Munandar, A. A. (2008). *Ibukota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian*. Komunitas Bambu.
- Nastiti, T. S. (2012). Krtanagaraduhita: Peranan dan Kedudukan Mereka di Kerajaan Majapahit. *Amerta*, 30(2), 110–122. <https://repository.kemdikbud.go.id/1291/>
- Nastiti, T. S. (2016). *Perempuan Jawa Kedudukan Dan Peranannya Dalam Masyarakat Abad VIII-XV*. PT Dunia Pustaka Jaya.

- Padmapuspita, K. J. (1966). *Pararaton : Teks Bahasa Kawi : Terjemahan Bahasa Indonesia*. Taman Siswa.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia : Zaman Kuno* (II). Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2011). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*. Komunitas Bambu.
- Rahmawati, L., Amsia, T., & Wakidi. (2013). Perjuangan Gajah Mada dalam Perluasan Wilayah Kekuasaan Majapahit di Nusantara Tahun 1336-1364. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, 1(1), 1–12. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/192>
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>
- Robson, S. (1995). *Deśawarṇana (Nāgarakṛtāgama) By Mpu Prapañca*. KITLV Press.
- Saraswati, U. (2016). Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(1), 105–113. <https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p105>
- Sidomulyo, H. (2007). *Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapañca*. Wedatama Widya Sastra, Yayasan Nandiswara, Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNESSA.
- Suhadi, M. (1993). *Tanah Sima dalam Masyarakat Majapahit*. Universitas Indonesia.
- Tedjowasono, N. S. (2019). *Relasi Kuasa pada Masa Jawa Kuno (Abad ke-8–15)*. 25–36. <https://doi.org/10.24164/prosiding18/03>
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Jalasutra.
- Wahyudi, D. Y. (2013). Gayatri Dalam Sejarah Singhasari Dan Majapahit. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 16–21. <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4743>
- Wardana, I. (2017). Birokrasi Tradisional Kerajaan Majapahit. *Social Studies*, 05(2), 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/322630710.pdf>
- Witasari, V. H. (2011). *Lambang Raja Pada Kerajaan Kuna Di Kawasan Indonsia Abad XI-XV Masehi: Sebuah Rekonstruksi Makna*. Universitas Indonesia.
- Yamin, M. (1962a). *Tatanegara Madjapahit Sapta-Parwa* (I). Yayasan Prapanca.
- Yamin, M. (1962b). *Tatanegara Madjapahit Sapta - Parwa* (II). Yayasan Prapanca.
- Zoedmulder, P., & Robson, S. (1995). *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. PT Gramedia Utama.